

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program Dana Kelurahan ialah program pendanaan yang mulai digelontorkan oleh Pemerintah pusat dari pertengahan tahun 2019 kepada Pemerintahan pada tingkat paling kecil yaitu pada tingkat Kelurahan. Lurah beserta perangkatnya sama halnya dengan kepala desa juga melayani masyarakat 1x24 jam sepanjang waktu dan hampir tidak ada hari libur. Mereka dituntut harus hadir dan melayani masyarakat kapanpun dibutuhkan, termasuk mengelola dan mengatasi berbagai masalah Rukun sosial kemasyarakatan yang timbul dalam masyarakat. Kompleksitas kehidupan masyarakat dalam wilayah kelurahan seperti wabah COVID-19, kemiskinan, masalah narkoba, keamanan dan ketertiban umum, infrastruktur jalan²/gang/lorong, saluran air/drainase, kebersihan, pembinaan mental rohani dan ideologi dan lain sebagainya, sehingga sering dikatakan bahwa wajah kehadiran pemerintahan sehari-hari sesungguhnya ada pada level pemerintahan kelurahan karena merekalah yang melayani dan interaksi langsung dengan masyarakat 1x24 jam dibantu Rukun Warga (RW) dan Tetangga (RT). Besaran jumlah penduduk, kepadatan jumlah penduduk, tingkat pendidikan masyarakat, luas wilayah, heterogenitas, jenis profesi warga, latar belakang sosial, gizi, tingkat kemiskinan dan pengangguran, sarana prasarana publik berupa fasilitas olahraga, taman, sarana peribadatan dan lain-lain menambah kompleksitas tuntutan pelayanan pemerintah kelurahan. Hal itu mencerminkan

betapa luasnya lingkup tugas dan tanggungjawab aparat pemerintah kelurahan. Oleh karena itu diberikan perhatian berupa dukungan alokasi pembiayaan khusus guna meningkatkan kinerja pemerintahan kelurahan (Kumolo, 2018).

Dana Kelurahan yang sejatinya dikucurkan oleh pemerintah pusat sebagai upaya pemerataan dana pembangunan hingga tingkat kelurahan dan diharapkan mampu dimanfaatkan secara optimal oleh pihak kelurahan dalam mengakselerasikan pembangunan diwilayahnya harus tersendat pelaksanaannya dikarenakan adanya pandemi COVID-19.

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan di akhir tahun 2019. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.

Wabah COVID-19 disebabkan oleh virus corona jenis baru. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.

Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman,

ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan.

Hingga saat ini pandemi covid ini masih menjadi isu yang sangat serius yang sedang ditangani baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Terus bertambahnya data orang yang terkonfirmasi COVID-19 dan masih banyaknya kematian masyarakat yang disebabkan oleh COVID-19 menandakan bahwa pandemi ini masih belum berakhir, pada data Nasional yang didapatkan dari Satgas COVID-19 nasional, menunjukkan jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 di Indonesia dari 15 maret 2020 hingga 24 Juli 2021 ialah sebagai berikut :

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Masyarakat Positif
COVID-19 di Indonesia



Sumber : *Our World in Data 2021*

Dari data tersebut didapatkan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia di bulan maret 2020 mengalami penambahan kasus sebesar 21 kasus peminggu dan kasus COVID-19 mulai mengalami lonjakan hari demi hari, pada data tersebut diatas, 5 provinsi di pulau jawa adalah penyumbang kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta dan Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur total masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 hingga saat ini ialah sebanyak 277.100 jiwa, Provinsi dengan tingkat kematian yang tertinggi ialah di Provinsi Jawa Timur yaitu dengan tingkat kematian 18.182 Jiwa per taanggap 27 Juli 2021, Hal tersebut dapat terlihat di laman Web : [www.https//covid.go.id](https://covid.go.id), data sebagai berikut ini :

Tabel 1.1 Data Kasus Covid 19 per-Provinsi di Indonesia

PROVINSI	DIRAWAT	TERKONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL
DKI Jakarta	64.118	792.275	716.718	11.439
Jawa Barat	128.279	569.070	432.632	8.159
Jawa Tengah	62.218	353.940	274.941	16.781
Jawa Timur	55.348	277.100	203.570	18.182
Kalimantan Timur	20.292	106.862	83.699	2.871
Daerah Istimewa Yogyakarta	31.686	104.778	70.171	2.921
Banten	42.858	104.552	60.020	1.674
Riau	8.796	88.105	76.927	2.382
Sulawesi Selatan	8.542	77.248	67.503	1.203
Bali	20.186	68.711	46.799	1.726
Sumatera Barat	10.731	65.704	53.580	1.393
Sumatera Utara	12.863	52.067	37.819	1.385
Kalimantan Selatan	6.214	43.835	36.421	1.200
Kepulauan Riau	8.783	41.408	31.651	974
Sumatera Selatan	7.722	41.218	31.640	1.856
Nusa Tenggara Timur	12.101	34.265	21.551	613

Kalimantan Tengah	7.701	32.580	24.227	652
Lampung	8.291	31.286	21.663	1.332
Kepulauan Bangka Belitung	4.866	30.009	24.589	554
Papua	12.994	25.076	11.860	222
Kalimantan Barat	4.963	23.416	17.915	538
Sulawesi Utara	4.171	21.813	17.007	635
Aceh	4.299	21.724	16.482	943
Sulawesi Tengah	4.084	19.103	14.489	530
Kalimantan Utara	4.304	18.622	14.029	289
Jambi	4.528	18.298	13.408	362
Nusa Tenggara Barat	2.392	18.019	15.078	549
Papua Barat	3.614	17.327	13.461	252
Bengkulu	3.754	15.609	11.611	244
Sulawesi Tenggara	2.899	15.255	12.044	312
Maluku	3.983	12.988	8.790	215
Maluku Utara	2.956	9.240	6.076	208
Sulawesi Barat	1.276	7.656	6.229	151
Gorontalo	910	7.211	6.094	207

Sumber : Satgas covid Indonesia, 27 Juli 2021

Dari total kasus positif COVID-19 di Jawa Timur, penyumbang kasus positif terbanyak berasal dari Kabupaten Bangkalan. Dimana kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bangkalan sebanyak 941 kasus. Hal tersebut membuat Kabupaten bangkalan menjadi satu-satunya kabupaten dengan zona merah di Provinsi Jawa Timur per tanggal 20 Juni 2021. Berikut adalah peta wilayah berdasarkan zona wilayah terdampak COVID-19.

Gambar 1.2 Peta Zona Wilayah Terdampak COVID-19 di Jawa Timur



Sumber : Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur

Dari data tersebut didapati jumlah warga Kabupaten Bangkalan yang terkonfirmasi positif COVID-19 sampai dengan 20 Juni 2021 mengalami kenaikan tajam sebanyak 941 orang kasus aktif pasca lebaran idhul fitri tahun ini. Pasca lebaran pasien covid di Kabupaten Bangkalan meningkat tajam menjadi 2.858 kasus pada 20 Juni 2021, dengan penambahan kasus baru sekitar 100 orang perhari.

Di satu sisi Satgas covid berusaha untuk mengurangi jumlah masyarakat yang terpapar covid, namun justru masyarakat tidak mematuhi anjuran Satgas covid. Dalam situasi tersebut semestinya tokoh masyarakat dan tokoh agama memberi suri tauladan yang baik untuk mematuhi protokol kesehatan, namun yang terjadi di lapangan justru terkadang malah sebaliknya. Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten di Bangkalan yang memiliki karakter masyarakat yang lebih patuh pada pemimpin informal daripada pemimpin formal, sehingga himbauan untuk patuh pada protokol kesehatan oleh para anggota Satgas covid banyak yang tidak dipatuhi oleh masyarakat atau cenderung diabaikan. Dalam situasi ini

pemimpin informal yang seharusnya memberikan tauladan yang baik dan menghimbau masyarakat untuk patuh protkes covid justru ada yang menjadi oknum memprovokasi masyarakat untuk tidak mempercayai adanya COVID-19 dan justru memberi contoh untuk mengabaikan anjuran protokol kesehatan COVID-19. Dengan demikian pandemi di Kabupaten Bangkalan berlangsung lama dengan kasus yang semakin meningkat. Dengan situasi tersebut Kabupaten Bangkalan saat ini menjadi isu nasional penyebaran COVID-19. Dengan adanya pandemi ini berpengaruh terhadap anggaran nasional termasuk terhadap anggaran kelurahan.

Dengan adanya pandemi ini maka muncul peraturan baru tentang *refocusing* anggaran di tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini banyak membuat kendala dalam pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Demangan, untuk mewujudkan pengelolaan dana kelurahan tersebut idealnya dilakukan dengan sejumlah tahapan, tetapi realisasinya peraturan tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, beberapa diantaranya adalah dilaksanakan dana kelurahan tanpa adanya sosialisasi, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang memadai sehingga kinerja keuangan di kelurahan menjadi tidak sesuai dengan yang direncanakan, di awal pencairan dana kelurahan dilaksanakan tanpa melalui musrenbangkel, selanjutnya dalam pengelolaan dana kelurahan yang semestinya digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pembangunan fisik sarana prasarana di kelurahan harus dialihkan pendanaannya terhadap upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Dengan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menganalisis tentang pengelolaan dana kelurahan selama

pandemi COVID-19 dan kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan dana kelurahan di Kelurahan Demangan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari uraian diatas mengindikasikan bahwa adanya pandemi covid berdampak pada kebijakan pemerintah, pemberian Dana Kelurahan pada Kelurahan yang pengelolaannya masih belum optimal, sehingga didapati rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan pada masa Pandemi COVID-19?
2. Bagaimana dampak kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan peraturan pengelolaan dana kelurahan pada masa Pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan di Kelurahan Demangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Menganalisis pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Demangan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan pada masa Pandemi COVID-19
2. Menganalisis dampak kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan peraturan pengelolaan dana kelurahan pada masa pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan di Kelurahan Demangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, referensi dan pengembangan tentang ilmu ekonomi utamanya ilmu ekonomi pembangunan. Khususnya pada pengetahuan tentang pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan pada masa pandemi COVID-19 di Kelurahan Demangan. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi para peneliti lain yang juga meneliti hal serupa dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai bahan kajian dalam perbaikan pengelolaan dana kelurahan dan juga secara khusus diharapkan bermanfaat juga bagi masyarakat kelurahan agar lebih mengetahui bagaimana alur perencanaan dan penganggaran dana kelurahan, sehingga masyarakat bisa lebih semangat mengikuti musrenbangkel dan berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat dan masukan pada pemerintahan kelurahan dalam membangun sumber daya alam, sumber daya manusia serta potensi lainnya di wilayah kelurahan.